Kemajuan Terkini Penelitian

Klaster
Sosial - Humaniora

Sambutan oleh
Prof. Dr. Retno S. Sudibyo, M.Sc., Apt.
Wakil Rektor
Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada

Editor
Drs. Jumina, Ph.D.
Dr.-Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Kantor Wakil Rektor bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada

Gedung Pusat UGM
Lantai 2 Sayap Barat, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Telpon 62-274-562011, 901909 **Facsimile** 62-274-901831
E-mail wrppkm@ugm.ac.id **Website** www.ugm.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Sambutan Wakil Rektor Bidang PPkM iii
Daftar Isi v
Peran Bio-nano Komposit pada Industri Masa Depan 1
Bambang Subiyanto, Lisman Suryanegara, Hiroyuki Yano
Pengembangan Material Nano Berbasis Protein dan Peptida 15
Arief Budi Witarto
Penelitian Universitas Dan Bisnis 12
Umar Juoro
Meningkatkan Mutu, Mencermati Isu: Potensi dan Tantangan Penelitian Sosial 31
Yunita T Winarto
Etnosains, Etnotek dan Etnoart Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi Kearifan Lokal 55
Heddy Shri Ahimsa-Putra
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Institusi Lokal 94
Afrizal
Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 113
Marsono
Kontribusi Budaya Lokal Terhadap Hukum Otonomi Daerah Sebuah Studi tentang Kebudayaan dan Hukum di Kabupaten Flores Timur 131
Max Boli Sabon
Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Kearifan Lokal yang Peduli Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Kecamatan Kokap, Kulon Progo 153
R. Ay. Siti Hariti Sastriyani, Soeprapto, Niken Herminningsih, dan Heri Susilowati
Pengaruh Ketidak amanan Kerja (*Job Insecurity*) sebagai Dampak Restrukturisasi terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Intensi Keluar *Survivor*. 159
Nur Wening
Kajian Restrospektif Program Pemberdayaan Wanita Nelayan di DIY 179
Oktiva Anggraini
Pesantren dan Radikalisme Agama 194
Syarif Hidayatullah
Dinamika Prasangka Etnis: Pelajaran dari Madura 213
Taufik

KAJIAN RESTROSPEKTIF PROGRAM PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN DI DIY

Oleh Oktiva Anggraini[2]

INTISARI

Program pemberdayaan wanita nelayan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di propinsi DIY belum menyentuh kepentingan wanita nelayan. Sebagai bentuk usaha yang subsisten, wanita nelayan telah mengalami kesulitan ganda, baik secara struktural maupun problem teknis usaha. Peran wanita nelayan dalam mencari nafkah yang merupakan penlaku aktif perubahan ekonomi masyarakat ne1ayan, belum banyak dipahami oleh pembuat kebijakan. Dari 120 wanita nelayan yang berpotensi di lokasi riset, desa pesisir Kemadang pantai Baron kabupaten Gunung Kidul, baru 42,5% yang mendapatkan akses pennodalan melalui program Pemberdayaan Wanita Nelayan yang dialokasikan DKP tahun 2004. Sungguhpun demikian, peran kelompok wanita nelayan untuk mengatasi permodalan, pemasaran dan pengembangan usaha cukup besar. Penelitian ini bertujuan mengaktualisasikan dinamika kelompok wanita nelayan dalam mendukung kebijakan pemberdayaan wanita nelayan integratif dengan PEMP serta mencetuskan pola pendampingan kelompok wanita nelayan yang relevan.Metodologi penelitian: desain penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan imptementasi Program pemberdayaan Wanita Nelayan di desa Kemadang berjalan cukup baik.Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan kelompok sasaran yakni wanita nelayan yang memberikan respon positif terhadap sosialisasi program, pelatihan dan perguliran modal serta pendampingan berkelanjutan yang dilaksanakan. Penguatan modal mampu meminimalisir kebiasaan wanita nelayan berhutang pada tengkulak atau rentenir. Di sisi lain, program ini terdapat kekurangan dari aspek pendampingan yang kurang mengacu pada kebutuhan lokal dan konsep pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan Program Pemberdayaan Wanita Nelayan khususnya dalam meningkatkan pendapatan wanita nelayan tidak luput dari sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kedinamisan kelompoknya yakni pemahaman anggota yang cukup baik terhadap 1) tujuan kelompok, 2) struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) pembinaan kelompok, 5) kekompakan keJompok, 6) suasana kelompok, 7) tekanan pad a kelompok berupa peringatan dan sangsi sosial dan 8) keefektifan kelompok. Di samping catatan positif tentang potensi wanita nelayan, masalah (1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok dan sangsi bagi yang melanggar peraturan kelompok (2) kurangnya informasi-informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok dalam penambahan anggota baru merupakan faktor yang melemahkan dinamika kelompok wanita nelayan. Oleh karena itu rekomendasi penelitian ini, suntikan modal selanjutnya hendaknya diarahkan ke pembentukan koperasi sehingga ruang gerak usaha dan perekrutan anggota pun tidak terbatas. Pendampingan intensif berupa bantuan teknis dan administrasi terhadap pengelolaan keuangan mutlak dilakukan, disamping mendekatkan akses pada perbankan. Selain melatih kerapian administrasi, pengarsipan dan rasa tanggung jawab yang tinggi juga menumbuhkan kemampuan *forecasting* dalam pengembangan usaha meski dalam skala mikro.

ABSTRACT

The fisherwomen empowerment program through the economic society coastal area empowerment in DIY have yet not touched the importance of fisherwomen. As subsistence effort, fisherwomen have several difficulties, whether it is a structural or a technical problem. The role of fisherwomen in finding a living which is an active behavior change in economic fisherwomen soceity, have not yet been understood by the poncy makers. From 120 fisherwomen which have potential in the research location, the Kemadang coastal village Baron beach Gunung Kidul, only 42,4% which has investment acces through the fisherwomen empowerment program which has a localized by DKP at 2004. Nevertheless, the role of fisherwomen empowerment group is to deal with invesment, market and the develompment is quite large. This research is meant to actualize the dynamics of the fisherwomen in supporting the interactive fisherwomen empowerment policy with the PEMP and create an escort pattern with is relevant with fisherwomen. Methodology research: descriptive qualitative research design with data observation gathering and tehnique , interview and documentation.

The research shows that the fisherwomen gave positive response toward the empowerment program. This can be seen from the target group involved in program socialization, training and the enrollment in investment and escort continuity, the investment strengthener may minimalize fisherwomen's habit to bOITOW money from broker and middleman. In the other hand, this program has some lacking aspect which refers to the local needs and the continuity development. The success of the fisherwomen empowerment program especially in raising their subsistence is not unconnected from some factors which can influence the level of fisherwomen dynamic, which is understanding of the member qiute gone towards 1) group purpose, 2) group structure, 3) the needs of duty, 4) group construction, 5) compact group, 6) group situation?) to enforce the group which are warning and punishment ,8) group effectivenness. Besides of the positive notes, about fisherwomen potencies, problem: 1) there are no written rules which regulate the group activities and punishement for those who break the rules, 2) Not enough information that are given to the member staff, 3) there is no recruiting a new member is awakening towards the fisherwomen empowerment program group dynamics. Because of that from the research recommendation, the next investment should be directed to The *Koperasi* establishement so the effort space and the member recruitment is unlimited. Intensive escort in the form of tehcnical support and administration toward the money management is a must, besides getting some bank access. Besides training the administration ordely archival matters and a high responsibility also develops the forecasting ability in developing bussiness even though in micro scale.

1. PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, masalah pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia memasuki babakan baru. Setelah dibentuknya Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP), serangkaian langkah-langkah pemerintah untuk lebih menyejahterakan masyarakat pesisir lebih mengerucut. Sebagaimana diketahui,

potensi sumber daya ikan laut tercatat sebanyak 6,26 juta ton per tahun, yang terdiri potensi perikanan di perairan zona ekonomi eksklusif berkisar 1 ,86 juta ton per tahun dan perairan wilayah Indonesia 4,40 juta ton per tahun pada masa Orde Baru kurang mendapatkan perhatian serius pemerintah *(Kompas, 20* September 2002). Setidaknya dengan berdirinya DKP, ada harapan yang besar terhadap pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di tanah air agar berjalan lebih optimal. Pemerintah tahun 2006 ini bahkan menargetkan produksi perikanan mencapai 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 3,1 %.

Salah satu program yang dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Program Pemberdayaan Wanita Nelayan, yang merupakan bagian dari PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna, akses wanita nelayan terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi dan meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan. Program yang digulirkan Departemen Perikanan dan Kelautan pada tahun 2004 dengan dana APBN tersebut, menyisakan sejumlah masalah yang membutuhkan keseriusan pemerintah untuk menanganinya.

Pre survey di lokasi penelitian, desa pesisir pantai Baron Kemadang, Tanjungsari, kabupaten Gunung Kidul, dalam program pemberdayaan wanita nelayan ditemukan sejumlah fenomena antara lain: 1) Kurangnya pendampingan dan minimnya kelompok wanita nelayan di Kabupaten Gunung Kidul yang menerima perguliran dana, yakni sebanyak 51 orang sebesar Rp. 51 juta, sementara separuh lebih lainnya minim permodalan. Wanita nelayan juga belum banyak diikutsertakan untuk merancang kegiatan usaha di daerahnya. 2) Pengalihan tugas dari LEPP sebagai pengelola bantuan nelayan kepada Bank Bukopin setempat menjadikan akses wanita nelayan semakin sulit untuk memperoleh bantuan kredit. 3) Anggapan bahwa bantuan modal seperti halnya *charity program* berdampak pada rasa ketergantungan penerima bantuan yang tinggi terhadap bantuan. Sekalipun ada hambatan secara struktural. Kelompok wanita nelayan di daerah tersebut memiliki modal sosial yang patut dibanggakan. Organisasi kelompok wanita nelayan memainkan perannya dalam memotivasi anggotanya dalam merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan memajukan pemasaran dan pemupukan permodalan. Studi tentang dinamika

kelompok, dalam hal ini kelompok wanita nelayan, menjadi menarik untuk melihat respon mereka terhadap program-program pemerintah. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, pada akhir riset ini akan dirumuskan perlakuan yang tepat agar program berjalan optimal, khususnya Program Pemberdayaan Wanita Nelayan yang partisipatif integratif PEMP. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan yang akan diwawancarai, selain ditentukan secara *purposive* oleh peneliti juga dilakukan secara *snowball* yakni melalui informasi yang diberikan informan yang sudah diwawancarai sebelumnya.

Hasil riset ini akan bermanfaat untuk pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkesinambungan, yang titik tekannya pada:

1. Memberikan masukan kepada instansi terkait tentang pola kemitraan yang tepat bagi pemberdayaan kelompok wanita nelayan sehingga diharapkan peran kelompok wanita nelayan dapat optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Memberikan masukan kepada instansi terkait tentang peranan kelompok wanita nelayan dalam meningkatkan partisipasi wanita nelayan daJam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1.Dinamika kelompok

Penelaahan terhadap kelompok-kelompok merupakan salah satu faldor penunjang perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan karena hasil penelaahan tersebut akan dapat mengembangkan konsep-konsep tentang dinamika kelompok. Dewasa ini dinamika kelompok merupakan pendekatan yang paling luas dan berpengaruh dalam studi tingkah laku kelompok. Jenkins (1961:6) mengemukakan bahwa dinamika kelompok *(Group Dynamics)* adalah kekuatan-kekuatan di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota kelompok menelaah dinamika kelompok berarti menelaah kekuatan-kekuatan yang muncul dari berbagai sumber di dalam kelompok. Tingkat kedinamisan suatu kelompok menurut Slamet (1978:359-362) ditentukan

oleh beberapa faktor, yaitu : 1) tujuan kelompok, 2) struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) pembinaan kelompok, 5) kekompakan kelompok, 6) suasana kelompok, 7) tekanan pada kelompok dan 8) keefektifan kelompok.

Keefektifan kelompok adalah tingkat efektivitas yang dapat diukur dari tercapainya tujuan kelompok itu dan besarnya kepuasan anggota setelah tercapainya tujuannya (Soedijanto,1980:22). Efektivitas ini mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan kedinamisan kelompok. Kelompok yang efektif akan meningkatkan atau setidak-tidaknya dapat mempertahankan kedinamisannya, sebaliknya, kelompok yang dinamis akan meningkatkan efektivitasnya. Efektivitas ini harus dilihat dari segi produktivitas, moral, dan kepuasan para anggota.

Dinamika kelompok akan nampak teJtihat dalam kegiatan ekonomi yang mereka jalin untuk memperbesar kelompok.Terbentuknya suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan satu-dua orang atau lebih, tidak saja mengakibatkan terbentuknya suatu kerjasama, tetapi juga menciptakan hubungan sosial. Omohundro dan Murais membedakan hubungan sosial dan empat tipe *(Ju Lan,* 1989:169) :

1. Hubungan sosial atas dasar ikatan kekerabatan baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Hubungan tersebut mencakup solidaritas, kepercayaan dan kerjasama.
2. Hubungan sosial atas dasar ikatan persahabatan, hubungan yang terbentuk melalui proses interaksi yang sering dan akrab.
3. Hubungan sosial atas dasar ikatan kerja yang terbentuk karena kesamaan lapangan kerja. Hubungan ini terbagi menurut peran secara vertikal (mengacu pada hubungan atasan bawahan) dan hubungan secara horisontal (mengacu pada hubungan antara sesama mitra kerja).
4. Hubungan sosial yang terbentuk karena adanya tujuan-tujuan praktis antara dua orang atau lebih.

Seorang individu dapat mempunyai keempat hubungan sosial tersebut dalam waktu yang sarna. Selanjutnya, hubungan sosial yang bersifat bisnis (kerja) terdiri dari :

1. *Patron (benefaktor),* yang terdiri atas kontrak pejabat pemerintah, sumber sumber keuangan dan bantuan-bantuan lainnya.
2. *Co-worker,* hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang berstatus

sama atau lebih, meliputi antara pekerja, agen pengusaha *(Ju Lan, 1989:170)*.

Menurut Kartini Sjahrir (1986:85), jaringan kerja bukan saja menjembatani bagaimana seharusnya dua orang atau lebih, tetapi juga menetapkan bagaimana seharusnya hubungan tersebut dapat bertangsung, dan pada tingkat apa intensitas hubungan dapat membawa seseorang kepada sumber-sumber ekonomi yang strategis.

Dalam salah satu penelitiannya, riset Hafifuddin menemukan berbagai faktor yang memperkuat dan memperlemah dinamika kelompok. Faktor-faktor yang memperkuat dinamika kelompok adalah :(1) tujuan yang kuat para anggota kelompok untuk memasuki kelompoknya (2) pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, (3) adanya sarana prasarana (4) adanya kepuasan anggota (5) besamya tingkat partisipasi anggota (6) koordinasi kegiatan yang relatif cukup lancar, (7) kepemimpinan yang mengayomi dan (8) tingkat keramahan yang tinggi dalam pergaulan. Sedangkan faktor-faktor yang memperlernah dinamika kelompok antara lain sebagai berikut :(1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok, (2) kurangnya informasi-informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok untuk mencari dan menambah anggota baru, dan (4) kurang adanya tekanan pada kelompok yang dapat menumbuhkan kegairahan berbuat para anggota untuk kemajuan kelompok (Hafifuddin, 1987:80).

2. Pemberdayaan Perempuan

Paradigma *bottom up* merupakan pendekatan yang ideal dalam pembangunan yang memperhatikan inisiatif, kreatifitas dan mengakomodasi kondisi sosial budaya wilayah setempat, potensi, permasalahan yang dihadapi. Berangkat dari hal itu, pembangunan masyarakat miskin mempunyai nuansa pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks *community development* berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri (Amiruddin (et.al), 2004, 230).

Tjokrowinoto mengatakan bahwa *empowering* memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) prakarsa desa, 2) dimulai dengan pemecahan masalah, 3) proses disain program dan teknologi bersifat asli/alamiah, 4) sumber utama

adalah rakyat dan sumber daya lokal, 5) kesalahan dapat diterima, 6) organisasi pendukung dibina dari bawah, 7) pertumbuhan organik bersifat tahap demi tahap, 8) pembinaan personil berkesinambungan, berdasarkan pengalaman belajar dari kegiatan lapangan, 9) diorganisir oleh tim interdisipliner, 10) evaluasi dilakukan sendiri, berkesinambungan dan berorientasi pada proses, 11) kepemimpinan bersifat kuat, 12) analisis sosial untuk definisi masalah dan program, 13) fokus manajemen adaJah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan (Tjokrowinoto dalam PLOD-DEPDAGRI, 2004: 232-234).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan semestinya meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial dan psikologis. Dengan berbagai upaya pemberdayaan tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Semakin banyak unsur-unsur kebutuhan yang dapat terpenuhi berarti akan semakin membawa kelompok masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan menuju sejahtera.

Ratna Saptari menambahkan bahwa dalam konsep pemberdayaan terdapat asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan, beberapa intervensi pemerintah, tanpa disertai upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melakukan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah diri sendiri situasinya, tidak akan berhasil (Ratna Saptari, 1997:160-161). Pendekatan ini berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Ini berarti kesamaan hak ekonomi. (peluang untuk menguasai sumber daya produktif, persamaan upah untuk kerja yang sarna, pertindungan ketenagakerjaan) hak-hak resmi tidak diskriminatif (mengenai perceraian, perkawinan, warisan, hak atas anak serta hak milik) serta hak-hak reproduktif dimasukkan dalam agenda. Pendekatan ini tidak terlalu menyibukkan diri dalam proyek-proyek pembangunan, tetapi menemukan perwujudannya dalam berbagai kegiatan gerakan perempuan di Dunia Ketiga. Pendekatan pemberdayaan lebih merupakan suatu ideologi dan filsafat feminis daripada suatu petunjuk praktis. Bagaimanapun istilah *'empowerment'* itu sendiri lebih banyak dikritik khususnya dikalangan LSM karena dikaitkan dengan ide 'mengambil alih kekuasaan'. Padahal sebenarnya *empowerment* sama sekali bukan berarti mengambil alih kekuasaan dan menyalin kembali struktur kekuasaan yang lama dengan cara merugikan kaum miskin, melainkan suatu usaha untuk mengubah corak kekuasaan itu sendiri ke arah yang lebih adil.

3. Pemberdayaan Wanita Nelayan

Wanita nelayan adalah suatu istilah untuk wanita yang hidup di lingkungan keluarga nelayan, baik sebagai isteri maupun anak dari nelayan pria. Kaum wanita di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktifitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini wanita nelayan bekerja sebagai pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, pembersih perahu yang baru mendarat, pengumpul nener, membuat/memperbaiki jaring, pedagang ikan dan membuka warung. Namun, peran wanita nelayan di lingkungan nelayan ini belum dianggap berarti, sebagai penghasil pendapatan pun dianggap income pendapatannya kecil dan tidak terlalu menyumbang bagi kesejahteraan keluarga. *(sri.murni@eudoramail.com)*. Sementara di sisi lain, wanita nelayan menanggung resiko tinggi akibat tingginya kecelakaan kerja di usaha penangkapan ikan laut.

Berangkat dari kondisi demikian, pemberdayaan wanita nelayan membutuhkan perhatian serius sebab dengan adanya pemberdayaan wanita nelayan maka wanita nelayan dapat :

1) Meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna untuk menfasilitasi wan ita nelayan mengembangkan usaha.
2) Meningkatkan akses wanita nelayan terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi.
3) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian wanita nelayan terhadap kesehatan keluarga dan sanitasi lingkungan.
4) Meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan.
5) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian kelembagaan wanita nelayan dengan tetap memperflatikan kelestarian sumber daya alam di kawasan perikanan.
6) Meningkatkan kesejahteraan wanita dan keluarga nelayan *(Petunjuk Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan (2001).*

Jalur pendidikan adalah salah satu upaya untuk pemberdayaan wanita. Pendidikan yang dimaksud dapat berujud pendidikan formal melalui jalur sekolah untuk generasi muda nelayan atau melalui pendidikan non formal berupa ceramah-ceramah dikalangan pengajian atau arisan, juga melalui percakapan informal lainnya berupa informasi-informasi. Penyuluhan kepada wanita nelayan

pun harus ditujukan kepada wanita itu sendiri bukan dengan mewakilkannya kepada kaum prianya, dengan harapan hasilnya akan lebih optimal. Permasalahannya kemudian, rendahnya pendidikan formal wanita nelayan akan mempengaruhi kemampuannya dalam menerapkan informasi yang seringkali disampaikan dengan metode penyampaian yang tidak tepat. Selain itu, pemberian materi yang terlalu tinggi dibanding kemampuan mereka yang terkadang ada yang buta huruf, menjadikan output penyuluhan jauh dari harapan.

Dari catatan peneliti, semenjak dicanangkan kegiatan PEMP di tahun 2004, program ini menghasilkan sederet perkembangan menarik seperti berkembangnya usaha skala kecil atau mikro di wilayah pesisir yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pengolahan produk perikanan secara tradisional, pemasaran ikan dan perikanan, perdagangan bahan pokok, perdagangan input produksi; meningkatnya akses permodalan usaha, pelaku usaha skala kecil atau mikro serta berkurangnya ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap tengkulak yang biasanya member1akukan suku bunga yang relatif tinggi. Selain itu, kesadaran nelayan untuk menjaga kelestarian alam kian meningkat serta berkembangnya aksi dan kepemilikan kolektif terfladap Bank Desa yang dikeJola dalam bentuk Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir Mikro Mitra Mina.

Namun, program ini menyisakan sejumlah masalah yakni LEPP-M3 yang terbentuk seeara *top down*, walaupun pengurusnya representasi anggota masyarakat, jaringan lembaga hampir praktis berhubungan secara eksklusif dengan Departemen Kelautan dan Perikanan serta jajaran birokrasi di bawahnya. Hal ini membuat LEPP-M3 kurang melakukan terobosan kerjasama dengan berbagai jaringan di luar Departemen Kelautan dan Perikanan. Persoalan kedua, berkembang anggapan bahwa bantuan sebagai modal yang tidak perlu dikembalikan sehingga frekuensi penerimaan bantuan relatif sering dan mudah menimbulkan rasa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan. Hal ini ditandai dengan besarnya tunggakan kredit nelayan antara 35-50% (Anggraini, 2006).

Bila tidak berhati-hati, program PEMP akan bernasib sama dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain yang semula bermaksud memandirikan rakyat namun justru berdampak sebaliknya, yakni 'memanjakan' mereka. Dengan tiadanya sanksi bagi penunggak kredit akan menjadi preseden bagi nelayan yang lain dan akan mengacaukan program penguatan modal.

Pada bagian lain, Suadi menekankan pentingnya pembagian peran yang sejajar

antara pria dan wanita dalam pengelolaan potensi pesisir. Wanita dapat berperan dalam mengurusi paska panen dan pemasaran hasil perikanan termasuk pengawetan, pengolahan, distribusi hasil perikanan sementara pria pada aspek produksi melalui kegiatan penangkapan ikan. penguatan pasca panen dan pemasaran tidak hanya bermakna bagi para wanita nelayan tetapi aktivitas perikanan secara keseluruhan karena aspek ini menjadi titik terlemah sektor perikanan. Program penguatan dapat dilakukan dengan melalui penguatan kelembagaan usaha berbasis kelompok. Dengan cara ini, program penguatan juga akan meningkatkan *bargaining position* para wanita dengan pesaing mereka yang pada umumnya kaum pria dengan modal lebih besar. Pengembangan program pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan terpadu dengan kegiatan lainnya, seperti wisata bahari merupakan peluang besar dan terbuka bagi aktualisasi peran wanita nelayan (http/:www.pesisir.blagspot.com/200604-01pesisir_archive.html.)

3. HASIL PENELITIAN

Program Pemberdayaan Wanita Nelayan merupakan bagian dari PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen us aha dan teknologi tepat guna, akses wanita nelayan terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi dan meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan. Di samping itu program ini bertujuan memper1ancar kelangsungan usaha masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan khususnya kelompok wanita nelayan. Program yang digulirkan Departemen Perikanan dan Kelautan dibiayai dengan dana APBN. Sebelum dilaksanakan program Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan yang merupakan proyek Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2004, di lokasi penelitian desa pesisir Kemadang, Baron, kecamatan Tanjung sari Gunung Kidul, telah terbentuk Kelompok Wanita Nelayan Sido Rukun dan kelompok Bakdi Manunggal. Namun berdasarkan identifikasi dari tim Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi DIY, diputuskan dibentuk kelompok wanita nelayan baru dan kedua kelompok sebelumnya menjadi embrionya. Kelompok Wanita Nelayan tersebut beranggotakan 51 orang wanita yang merupakan sekumpulan penjual ikan yang memiliki komitmen yang kuat dan visi yang sama untuk memajukan para penjual ikan.

Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi, program

Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan telah berjalan cukup baik, mendapat respon positif dari kelompok sasaran, yakni kelompok wanita nelayan. Artinya, isi dan tujuan program setidaknya cukup dipahami dengan baik yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran mereka yang tinggi pada saat sosialisasi, tiap pertemuan anggota dan pelatihan. Disamping itu, ada kesadaran yang tinggi bagi mereka untuk mengangsur pinjaman modal setiap bulan kepada kelompoknya. Kemampuan wanita nelayan dalam mengakses informasi program juga turut menentukan berhasil tidaknya implementasi program tersebut. Selama 19 bulan berjalan, mereka mendapatkan informasi langsung perihal pembinaan dari pihak Diskanla DIY maupun pendamping pelaksana meJalui perwakiJan kelompok per bulannya.

Ditilik dari sisi sumber daya, minimnya sumber dana yang digulirkan mengakibatkan hanya 42,5% saja dari total jumlah wanita nelayan yang terjangkau program ini. Dana pinjaman 1 juta rupiah yang diberikan kepada wanita nelayan tidak cukup membantu banyak untuk pengembangan usaha. Pada bagian lain, dengan perguliran dana yang tidak marata menyulitkan bagi yang tidak menerima untuk memiliki akses permodalan dan pelatihan yang sama dengan kelompok yang telah menerima bantuan. Meski demikian, dari aspek pemanfaatannya program ini telah mampu menggiring wanita nelayan untuk lebih berpartisipasi merencanakan dan mengembangkan usahanya melalui komunitas kelompok. Selain itu, program ini cukup dapat meningkatkan pendapatan dan menambah jumlah wanita nelayan yang terjun dalam pengembangan pengolahan ikan. Bila sebelum program diimplementasikan, pendapatan wanita nelayan per minggu mencapai 30 ribu rupiah sementara sesudah program ini berlangsung, pendapatan mereka meningkat berkisar 50 hingga 200 ribu per minggu. Jumlah pengolah ikan semula 10-15 orang kini mencapai 120 orang.Selain tujuan tersebut tercapai, penguatan permodalan melalui kelompok wanita nelayan dapat meminimalkan kegiatan mereka berhutang pada tengkulak maupun rentenir pad a masa-masa paceklik atau ketika tahun ajaran baru. Hingga putaran dana yang ketiga akhir bulan September, kelompok wanita nelayan pantai Baron ini telah mengumpulkan uang jasa pinjaman/keuntungan lebih dari 15 juta rupiah.

Sederet catatan peneliti dari sisi kesiapan aparat birokrasinya, nuansa tarik ulur 'rebutan proyek' antara Diskanla Propinsi dan Bapeda sub bidang Pertanian Kabupaten Gunung Kidul cukup jelas. Keterlibatan pemerintah daerah

dan LEPP setempat, selama ini sebatas koordinasi saja dan bukan pelimpahan tanggung jawab pembinaan. Dalam pelaksanaan proyek Program Pemberdayaan Wanita Nelayan DIY ini, pihak LEPP, Artha Samudra tidak dilibatkan dan ini sempat disesalkan oleh para pengurusnya (wawancara Agustus 2006). Sejak awal proyek yang ditangani Diskanla DIY ini mendapat mitra pendamping pelaksana BeePro Consulting yang bertanggung jawab menangani program pelatihan hingga perguliran dana. Fungsi mitra pendamping di sini adalah memberi arahan, pandangan, program kerja dan hal teknis yang telah disusun oleh Bagian Proyek Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY TA 2004 kepada wanita nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam implementasinya, perguliran dana terlambat dua bulan dari jadwal yang seharusnya. Penundaan ini disertai sejumlah alasan Diskanla bahwa bila dana tersebut dikucurkan menjelang Lebaran 2004, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dana ke arah pembelanjaan konsumtif dari wanita nelayan. Sementara dari sisi wanita nelayan, sebenarnya perguliran dana itu amat diharapkan karena pada saat Lebaran dan liburannya, pantai Baron dipadati pengunjung. Saat itulah, kesempatan emas mereka untuk mendulang rupiah dari pengolahan ikan, toko cindera mata dan rumah makan. Selain problem bertaut masalah dana, input yang diberikan mitra pendamping tidak terlalu efektif mengingat penanggung jawab BeePro Consulting, salah satunya adalah Kepala Diskanla Propinsi DIY. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dari program ini cukup lemah.

Selanjutnya, setelah perguliran dana dilakukan. penanganan pendampingannya dilanjutkan oleh CV Global Mandiri, mitra yang ditunjuk Diskanla Propinsi DIY. Pemindahan kewenangan pembinaan tersebut setidaknya mengoyak ikatan yang terjalin dengan baik antara kelompok sasaran dan mitra pendamping sebelumnya. Di sisi lain, kontinuitas program terganggu karena mitra terakhir ini harus mempelajari ulang karakter dan perlakuan terhadap kelompok sasaran. Penanganan pembinaan pun kurang peka terhadap kearifan-kearifan lokal sehingga peran fasilitator lebih sebagai pengawas daripada agen pembangunan. yang diharapkan mampu mengantarkan kelompok wanita nelayan aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada Sebagai catatan, sektor perikanan merupakan sektor yang baru lima tahun terakhir ini mereka tekuni setelah sebelumnya mereka lebih dikenal sebagai penggarap lahan pertanian. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kebiasaan lama wanita

nelayan dalam pengepakan ikan, pembukuan yang tidak rapi dan kurangnya sanitasi pengolahan makanan masih dijumpai. Pelatihan yang telah diberikan terkadang kurang mengacu pada ketersediaan fasilitas, potensi perikanan dan kelautan setempat dan kemampuan wanita nelayan itu sendiri.

Mengacu pada problema di lapangan, kebutuhan wanita nelayan berkelompok juga ditunjang dengan ketersediaan modal usaha yang dikelola kelompok dipadu semangat gotong royong yang tinggi. Hal ini merupakan modal sosial yang berperan dalam pembentukan dan penguatan modal yang sesungguhnya. Dengan demikian mereka merasa kelompok itu milik bersama yang harus dibina dan dikembangkan secara bersama pula dan mewujudkan fasilitas agar kelompok dapat hidup dan berkembang dengan baik. Disamping catatan positif tentang potensi wanita nelayan sebagaimana terurai diatas, masalah (1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok dan sangsi bagi yang melanggar peraturan kelompok (2) kurangnya informasi–informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok untuk mencari dan menambah anggota baru merupakan faktor yang melemahkan dinamika kelompok wanita nelayan. Kedepan, melihat dinamika kelompok wanita nelayan yang cukup tinggi terhadap program-program pemerintah, patut kiranya mendapat imbangan keseriusan pemerintah untuk merancang program pendampingan berbasis potensi lokal yang lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan Program Pemberdayaan Wanita Nelayan khususnya dalam meningkatkan pendapatan wanita nelayan tidak luput dari peran kelompok wanita nelayan dalam mengelola keuangan dan memotivasi anggotanya untuk aktif dalam program ini. Dinamika wanita nelayan yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh sederet faktor yakni pemahaman anggota yang cukup baik terhadap 1) tujuan kelompok, 2) struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) pembinaan kelompok, 5) kekompakan kelompok, 6) suasana kelompok, 7) tekanan pada kelompok berupa peringatan dan sangsi sosial dan 8) keefektifan kelompok. Disamping catatan positif tentang potensi wanita nelayan sebagaimana terurai di atas, masalah (1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok dan sangsi bagi yang melanggar peraturan kelompok (2) kurangnya informasi-informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok untuk mencari dan menambah anggota baru merupakan

faktor yang melemahkan dinamika kelompok wanita nelayan.

Melihat potensi wanita nelayan di lokasi penelitian, kemungkinan untuk membentuk koperasi wanita nelayan cukup besar sehingga suntikan modal selanjutnya hendaknya diarahkan ke pembentukan koperasi sehingga ruang gerak usaha dan perekrutan anggota pun tidak terbatas. Pendampingan intensif meliputi bantuan teknis dan administrasi temadap pengelolaan keuangan mutlak dilakukan. Kedepan, pemerintah hendaknya memfokuskan pada penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi wanita nelayan yang semula bergerak di sektor pertanian, beralih ke sektor perikanan dengan cara mempermudah akses mereka ke sumber modal usaha, teknologi dan informasi yang dibutuhkan. Penumbuhkembangan sektor non pertanian, seperti kerajinan rakyat, perdagangan kecil-sektor informal, diharapkan dapat menjadi penyangga kesejahteraan keluarga nelayan. Tidak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan pemberdayaan wanita nelayan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan komunitasnya agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya.

NOTES: LAMPIRAN FOTO (dalam soft copy):

1. Penjualan kerajinan laut
2. Suasana Pasar Ikan Pasca Gempa Bumi
3. Suasana Pantai Baron paska Gempa Bumi
4. Kelompok Wanita Nelayan desa Kemadang dalam suatu Pelatihan Kewirausahaan wanita Nelayan diselenggarakan UWMY.

5 .DAFTAR PUSTAKA

Amirudin (ed.), 2004, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, PLOD UGM dan DEPDAGRI, Yogyakarta, Jogja Global Media.

Anggraini, Oktiva, 2006, Laporan Penelitian tentang *Dinamika Kelompok Wanita Nelayan dalam Pengembangan Mikro Mitra Mina di Kabupaten Gunung Kidul*.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, Petunjuk Teknis Pemberdayaan Wanita Nelayan. Bagian proyek Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dep. Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Hafidhuddin, Didin, 1987, *Kelompok Pengajian Sebagai Potensi Media Penyuluhan Pembangunan Masyarakat Desa, Thesis*, Fakultas Pascasarjana IPB, Bogor.

Jenkins, D.H, 1961, *What is Group Dynamics?* in Group Development Selected Reading Series One. National Training Laboratories, edited by L.P. Dardford, National Education Association, Washington.

Ju Lan, Thung, 1989, Jaringan Sosial Elit Ekonomi Etnis Cina di Indonesia : Studi Kasus Pengusaha Konstruksi di Jakarta, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, no. 2.

Rokhmin Dahuri, 2001, *Pengelolaan SumberDaya Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta, Pradnya Paramita.

——— ,2002, *Kebijakan Menanggulangi Praktek Perikanan ilegal*, Jakarta.

Ratna Saptari, 1997, *Perempuan Kerja dan Perobahan Sosial*, Jakarta.

Sjahrir, Kartini, 1986, Tukang- Tukang Bangunan di Jakarta: Suatu Jaringan Kerja, *Jurnal Prisma*, no.9, September.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

TCPA, 1985, *Planning for Suitable Environment*, London, Earthscan Publication.

JURNAL DAN SURATKABAR

Kompas, 20 September 2002

sri.murni@eudoramail.com

Progress Report tahap III, 2005, BeePro Consulting, Yogyakarta.